

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN.....	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Politik Hukum, Kriminalisasi, dan Pembentukan Peraturan.....	18
1. Politik Kriminal dan Politik Hukum Pidana di Indonesia	18
2. Kriteria Umum Kriminalisasi dan Asas-asasnya.....	21
3. Teori Legislasi	25
B. Keadilan Antargenerasi dalam Lingkungan Hidup Berkelanjutan.....	28
1. Keadilan Antargenerasi: Sebuah Hak dan Kewajiban.....	28
2. Pengakuan Prinsip Keadilan Antargenerasi dalam UU PPLH	30
C. Diskursus tentang Ekosida	32
1. Mengenal Perbuatan Ekosida	32
2. Perdebatan Seputar Ekosida dalam Komunitas Internasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Data Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Analisis Data	44
E. Penarikan Kesimpulan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Urgensi Kriminalisasi Ekosida di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Antargenerasi	46
1. Pemenuhan Kriteria Kriminalisasi dalam Perbuatan Ekosida.....	49
2. Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Merespon Ekosida.....	66
3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Urgensi Kriminalisasi Ekosida.....	77
B. Visibilitas Kriminalisasi Ekosida dalam Rezim Hukum Indonesia Terkini	93
1. Perbandingan Ketentuan Pidana Ekosida dalam Berbagai Negara	94
2. Peluang Mendudukkan Ekosida sebagai Tindak Pidana di Indonesia...	113
3. Usulan Konsep Formulasi Kriminalisasi Ekosida dalam Rezim Hukum Indonesia Terkini	125
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Pemenuhan Kriteria Kriminalisasi Perbuatan Ekosida	66
Tabel 02. Bentuk <i>Legal Gaps</i> dalam Merespon Ekosida	76
Tabel 03. Ketentuan Pidana tentang Ekosida di Berbagai Negara	108

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Tabel	159
Daftar Panduan Pertanyaan Wawancara	165
Daftar Narasumber Wawancara	165

DAFTAR SINGKATAN

Penulisan Singkat	Penulisan Lengkap
AKAPSI	Asosiasi Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia
Deklarasi Rio	<i>Rio Declaration on Environment and Development</i>
FWI	<i>Forest Watch Indonesia</i>
ICC	<i>International Criminal Court</i>
ICEL	<i>Indonesian Center for Environmental Law</i>
IKN	Ibu Kota Negara Nusantara
ILC	<i>International Law Commission</i>
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Konvensi ENMOD	<i>Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environment Modification Techniques</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP 2023	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2023
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PT JJP	PT Jatim Jaya Perkasa
PP Penyelenggaraan PPLH	Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SIDS	<i>Small Island Developing States</i>
UU Cipta Kerja	Undang-Undang Cipta Kerja
UU HAM	Undang-Undang Hak Asasi Manusia
UU IKN	Undang-Undang Ibu Kota Negara
UU PLH	Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU PPLH	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU P3	Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia